



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

---

# **Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI**

**KLIPING  
BERITA MEDIA CETAK  
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

---

**HARI JUMAT, 26 APRIL 2013**



DAFTAR ISI

Infrastruktur .....	1
Angkutan Massal .....	2
Layanan Pelabuhan .....	3
Tol Bali .....	4
Layanan Bandara .....	5



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☐ Jan ☐ Feb ☐ Mar ☒ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☐ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Infrastruktur Rel Ganda PTBA Terus Tunda Proyek	<div><div>- Proyek rel ganda kereta api di Sumatera Selatan tersebut terpaksa ditunda pembangunannya karena nilai proyek itu mengalami pembengkakan signifikan</div><div>- Alasan lainnya adalah terkait dengan aturan Menteri Perhubungan yang mengharuskan pengembang infrastruktur memiliki izin usaha pertambangan (IUP)</div><div>- Proyek ini akan ditawarkan kembali kepada investor baru, salah satunya berasal dari Jepang</div></div>			US\$ 2,4 miliar	PT. Bukit Asam Tbk	

► INFRASTRUKTUR REL GANDA

PTBA Terus Tunda Proyek

Vega Aulia Pradipta & Irsad Sati  
redaksi@bisnis.co.id

JAKARTA—Meski telah memasuki kuartal II/2013, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) masih terus menunda proyek infrastruktur pembangunan rel ganda kereta api di Sumatra Selatan yang kerjasama bersama dengan PT Adani, perusahaan asal India.

Direktur Utama PTBA Milawarna menjelaskan proyek rel ganda yang membentang sepanjang 244 kilometer dari Kabupaten Muara Enim hingga Pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatra Selatan tersebut terpaksa ditunda pembangunannya karena nilai proyek itu mengalami pembengkakan signifikan.

“Studi kelayakannya sudah selesai, tetapi nilai investasinya meningkat dari US\$1,6 miliar menjadi US\$2,4 miliar sehingga terpaksa ditunda,” ujarnya ketika ditemui sesuai RUPS, Kamis (25/4).

Alasan lainnya adalah terkait dengan aturan Menteri Perhubungan yang meng-

haruskan pengembang infrastruktur memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Sesuai dengan Permenhub No. 91/2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretapiian Khusus disebutkan bahwa penyelenggaraan perkeretapiian khusus hanya bisa dilakukan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan pokok seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, atau pariwisata.

Dalam hal ini, PT Adani tidak bergerak di bidang-bidang usaha tersebut dan hanya ingin membangun infrastruktur *double track* saja, yang semula direncanakan dimulai pada tahun lalu.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Musni Wijaya pada Rabu (20/3) mengungkapkan Adani telah mengundurkan diri dari proyek rel itu.

“Sepertinya proyek ini akan ditawarkan kembali kepada investor baru, salah satunya berasal dari Jepang,” jelasnya.

(Chandran Purwoko)



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Bali Ditawari KA Dalam Kota	<div><div>- Kementerian Perhubungan membuka opsi kepada investor yang akan menanamkan modalnya untuk membangun dan mengembangkan sarana transportasi kereta api di Bali</div><div>- Opsi selain mengembangkan kereta api lingkari Bali, yakni kereta api yang menghubungkan kawasan wisata dan sejumlah obyek vital termasuk bandara dan pelabuhan</div><div>- Selain memecah kemacetan di kawasan pariwisata Bali, konsep pengembangan ini juga akan mengacu pada optimalisasi pengembangan destinasi wisata yang ada di Bali</div></div>					

▶ ANGKUTAN MASSAL

Bali Ditawari KA Dalam Kota

DENPASAR—Kementerian Perhubungan membuka opsi kepada investor yang akan menanamkan modalnya untuk membangun dan mengembangkan sarana transportasi kereta api di Bali.

Kereta api yang menghubungkan kawasan wisata di Pulau Dewata itu masih akan berada di kawasan selatan Bali. Pasalnya, kawasan wisata seperti Sanur, Seminyak, Kuta, Jimbaran dan Nusa Dua masih berada di kawasan selatan.

Selain itu, fasilitas berupa objek vital seperti Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa juga berada di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Tundjung Inderawan, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, mengatakan opsi selain mengembangkan kereta api lingkari Bali, yakni kereta api yang menghubungkan kawasan wisata dan sejumlah obyek vital termasuk bandara dan pelabuhan, masih dalam *pre feasibility study*.

"Jepang melalui kementeriannya juga pernah me-

ngadakan studi itu di Bali," katanya, Kamis (25/4).

Pada kajian pra studi kelayakan, lanjutnya, terdapat opsi penggunaan monorel dan *light train* dengan kapasitas 600 penumpang. Sarana transportasi massal ini nantinya akan menghubungkan dari satu kawasan wisata ke kawasan wisata lainnya, serta bandara dan pelabuhan.

Dalam segi pembiayaan, katanya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema antara lain *public private partnership* (PPP). Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan untuk pengembangan sarana transportasi ini.

Selain memecah kemacetan di kawasan pariwisata Bali, papar Tundjung, konsep pengembangan ini juga mengacu pada optimalisasi pengembangan destinasi wisata yang ada di Bali.

Sebelumnya, Pemprov Bali mendesak pemerintah pusat segera mengucurkan anggaran untuk pengembangan kereta api lingkari Bali. (Ashari Purwo)



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Forwarder Bahas Tarif Tunggal di Priok	<div>- Rencana penerapan single billing kargo LCL di Pelabuhan Tanjung Priok tidak berpengaruh hingga bisa mematikan bisnis forwarder yang sudah ada</div> <div>- Penerapan single billing kargo LCL hanya diberlakukan terhadap mitra dasilitas pergudangan di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok</div> <div>- Penerapan kebijakan itu bisa memacu modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok dengan membuat klasterisasi kegiatan terminal</div>				<div>- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)</div> <div>- PT. Pelindo II</div>	

LAYANAN PELABUHAN

Forwarder Bahas  
Tarif Tunggal di Priok

JAKARTA—Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mulai membahas rencana pemberlakuan tarif tunggal terhadap pelayanan kargo impor berstatus *less than container load* di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Sofian Pane mengatakan pihaknya sedang menginventarisasi dampak dari penerapan tarif tunggal terhadap perusahaan *forwarder* konsolidator yang selama ini menangani kargo impor berstatus *less than container load* (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Perusahaan *forwarder* konsolidator itu juga anggota kami dan kami sudah menerima keluhan informal dari sejumlah perusahaan tersebut terkait rencana *single billing* kargo LCL di Priok mulai bulan depan," ujarnya Rabu (24/4).

Dia mengharapkan rencana penerapan *single billing* kargo LCL di Pelabuhan Tanjung Priok tidak berpengaruh hingga bisa mematikan bisnis *forwarder* yang sudah ada.

Sofian menyatakan pihaknya segera mengundang seluruh perusahaan *forwarder* yang menangani kargo LCL itu untuk membahas persoalan itu.

"Jadi, saya belum bisa menyikapinya sekarang, masih kami lakukan kajian soal itu," tuturnya.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Tanjung

Priok Ari Henryanto menyatakan penerapan *single billing* kargo LCL hanya diberlakukan terhadap mitra fasilitas pergudangan di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk gudang di luar pelabuhan, ungkapnya, bukan merupakan kewenangan PT Pelindo II.

"Itu [*single billing*] kargo LCL hanya bagi gudang yang ada pada HPL [hak pengelolaan lahan] Priok, sedangkan *provider* gudang yang di luar pelabuhan kami tidak mengatur," paparnya.

MANFAAT TARIF TUNGGAL

Ari menegaskan implementasi tarif tunggal diyakini bisa memberikan data akurat terhadap pelayanan kargo yang selama ini keluar masuk pelabuhan.

Selain itu, dia menambahkan penerapan kebijakan itu bisa memacu modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok dengan membuat klasterisasi kegiatan di terminal.

Untuk Terminal 1 di Pelabuhan Tanjung Priok, ungkapnya, pihaknya akan menyiapkan menjadi terminal mini yang bisa melayani kapal peti kemas dengan *draft* rendah sekitar -6 LWs.

Khusus Terminal 2 akan difokuskan untuk layanan nonkontainer atau *breakbulk* sedangkan Terminal 3 untuk pelayanan peti kemas baik domestik maupun internasional. (a)





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Wika Pilih Pertahankan 0,4% Saham	<div>- BUMN pemegang saham minoritas di Jasamarga Bali Tol sebaiknya menjual sahamnya kepada investor agar modal awal yang telah dikeluarkan dapat diperoleh kembali</div> <div>- BUMN Karya yakni PT. Wijaya Karya, Tbk, PT. Adhi Karya, Tbk dan PT. Utama Karya memiliki saham minoritas di proyek jalan tol senilai Rp.2,48 triliun</div> <div>- Adanya kesepakatan akan tergerusnya saham BUMN akibat perjanjian masuknya BUMD Bali tidak menyalahi aturan</div>				- PT. Jasa Marga,Tbk	

JALAN TOL BALI

Wika Pilih Pertahankan 0,4% Saham

JAKARTA—PT Wijaya Karya (Wika) Tbk memilih bertahan untuk tidak melepas kepemilikan saham di PT Jasamarga Bali Tol, meski Menteri BUMN Dahlan Iskan menyarankan BUMN melepas saham minoritas di perusahaan jalan tol tersebut.

Dimas Novita Sari  
redaksi@bisnis.co.id

Direktur Wika Budi Harto mengatakan perseroan tidak akan melepas dan hanya akan mengalami dilusi dalam kepemilikan saham perseroan di Jasamarga Bali Tol.

"Tidak, biar saja untuk kenang-kenangan," katanya sesuai rapat umum pemegang saham perseroan, Kamis (25/4).

Sebelumnya, Menteri BUMN menyarankan agar perusahaan pelat merah yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol Bali dan menjadi pemegang saham minoritas di perusahaan keluar dari proyek tersebut.

Di Jasamarga Bali tol, pemilik jalan tol di atas laut sepanjang 9,7 kilometer tersebut, terdapat tujuh BUMN sebagai pemegang saham, yakni PT Jasamarga Bali Tol yakni PT Jasa Marga Tbk, PT Angkasa Pura I, PT Pelindo III, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Utama Karya, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali.

Adapun pemilik saham lainnya

- Saham sebagai kenang-kenangan.
- Adhi Karya siap hengkang.
- BPJT belum terima dokumen revisi kepemilikan.

adalah Pemprov Bali dan Pemkab Badung.

Menurut Dahlan, BUMN pemegang saham minoritas di Jasamarga Bali Tol sebaiknya menjual sahamnya kepada investor agar modal awal yang telah dikeluarkan dapat diperoleh kembali.

"Saya mau mereka [BUMN dan pemegang saham minoritas] keluar dari proyek jalan tol Bali karena mereka pemegang saham minoritas bukan mayoritas," tutur Dahlan, Rabu (24/4).

Menurutnya, penjualan kepemilikan saham tersebut merupakan bisnis yang sudah umum dilakukan di perusahaan kontraktor.

Sementara itu, Direktur PT Adhi Karya Tbk Kiswodarmawan mengatakan instruksi Menteri BUMN untuk melepaskan kepemilikan saham tidak masalah bagi perusahaan.

"Kami nantinya juga akan pull out dari sana, jadi tidak masalah dengan dilusi saham tersebut," katanya.

Menurutnya, dengan melepas saham tersebut maka perusahaan dapat menggunakan uang tersebut untuk bisnis lainnya. "Kalau tidak salah hanya Rp14 miliar, itu kan sangat kecil sekali, bisa dipakai untuk yang lain."

KESEPAKATAN AWAL

Budi menjelaskan dari awal masuknya perseroan ke perusahaan tol Nusa Bali-Tanjung Benoa

Pemilik Baru Saham PT Jasamarga Bali Tol

Perusahaan	Saham Baru	Sebelumnya
PT Jasa Marga Tbk	55	60
PT Pelindo III	17,98	20
PT Angkasa Pura I	8	10
PT Wijaya Karya*	--	5
PT Utama Karya	1	2
PT Adhi Karya Tbk	1	2
PT Pengembangan Pariwisata Bali	1	1
Pemprov Bali	8,01	--
Pemkab Badung	8,01	--

Sumber: Jasamarga Bali Tol  
Ket: \*) Dalam proses pelepasan

tersebut telah terjadi kesepakatan yang akan menggerus kepemilikan saham.

"Sudah terjadi kesepakatan dari awal, kalau badan usaha daerah tingkat I dan II Badung dan Bali akan masuk di tengah jalan, sehingga saham kami akan mengalami dilusi kepemilikan dari 5% menjadi 0,4%," jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, kemungkinan terjadinya dilusi saham tersebut sudah disetujui oleh para pemegang saham perseroan.

"Kami akan siapkan segala administrasi yang terkait dan kemudian akan kami ajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum," tambahnya.

Seperti yang diketahui, BUMN Karya yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Utama Karya memiliki saham minoritas di proyek jalan tol senilai Rp2,48 triliun.

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol mengatakan dilusi saham BUMN Karya yang berada di PT Jasa Marga Bali Tol belum dapat dipastikan, menyusul belum masuknya usulan revisi kepemilikan saham.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazaly menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen mengenai revisi kepemilikan saham.

"Revisi usulan belum masuk. Yang jelas, usulan yang masuk harus mampu dibuktikan dengan dokumen keuangannya, apakah ada dananya atau tidak. Kalau tidak ada, ya...tidak boleh," katanya melalui pesan singkat kepada *Bisnis*, Kamis (25/4).

Lebih lanjut, Gani mengatakan adanya kesepakatan akan tergerusnya saham BUMN akibat perjanjian masuknya BUMD Bali tidak menyalahi aturan.

"Boleh saja atas persetujuan Menteri PU tentunya, yang jelas kami harus evaluasi terlebih dahulu," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama Jasa Marga Bali Tol Akhmad Tito Karim mengatakan saat ini perubahan komposisi saham tersebut masih dalam proses.

"Belum ada apa-apa, masih proses, mungkin minggu depan," katanya. (Zuhriat) B



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Layanan Bandara Investasi Jasa angkasa Melonjak 100%	<div>- Peningkatan investasi itu seiring dengan rencana penggantian alat atau mesin lama yang harus diganti guna meningkatkan layanan ground handling bagi seluruh klien perseroan</div> <div>- Kontribusi utama perseroan memang berasal dari pelayanan darat di bandara</div>			Rp.30 miliar	PT. Jasa Angkasa Semesta	

▶ LAYANAN BANDARA

Investasi Jasa Angkasa Melonjak 100%

JAKARTA—PT Jasa Angkasa Semesta, perusahaan jasa pelayanan darat di bandara, menyapkan dana investasi sekitar Rp30 miliar pada tahun ini atau naik 100% untuk belanja alat pendukung usaha.

Ardjuna Sitorus, Chief Corporate Affairs Officer Jasa Angkasa Semesta (JAS), mengatakan peningkatan investasi itu seiring dengan rencana pergantian alat atau mesin lama yang harus diganti guna meningkatkan layanan *ground handling* bagi seluruh klien perseroan.

"Memang usia alat-alat atau mesin kami itu cukup lama sekitar 8 tahun sampai 10 tahun dengan perawatan yang baik," katanya ditemui *Bisnis* belum lama ini.

Sejumlah alat yang akan dibeli itu di antaranya *pushbacker* dengan harga satuan mencapai Rp3 miliar-Rp4 miliar dan *high lift loader* yang berfungsi sebagai alat *loading* dan *unloading*.

Alat pendukung lain trolis untuk *container* dan *pallet*, *aircraft refuellers*, *tugs and tractors*, *ground power unit*, *airport buses*, *transporters*, *portable water truck*, *air starter*, *lavatory service vehicles*, *passenger boarding stairs*, dan lainnya.

Ardjuna yang sebelumnya menjabat Executive Vice President PT Cardig International itu menambahkan perseroan melayani empat lini usaha yakni *ground handling*, *cargo handling*, layanan khusus penumpang atau *airport special assistance* dan *lounge*.

Sampai saat ini, kontribusi utama perseroan memang berasal dari bisnis pelayanan darat di bandara. Jasa *ground handling* itu mencakup kargo, pergudangan, bagasi penumpang, dan parkir pesawat.

Sebelumnya, perseroan mematok pertumbuhan bisnis 12% dengan meningkatkan pelayanan *ground handling* pada 11 bandara.

Pada tahun lalu, perseroan yang sudah tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia mencatatkan pendapatan Rp800 miliar, naik dari pendapatan 2011 sebesar Rp650,07 miliar. Secara keseluruhan PT JAS menangani layanan *ground handling* di sejumlah bandara sebesar 70%.

Sejumlah perusahaan maskapai asing di Indonesia yang ditangani JAS di antaranya Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates, All Nippon Airways dan KLM.

Kompetitor utama JAS ialah PT Gapura Angkasa yang merupakan perusahaan patungan PT Garuda Indonesia Tbk, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II.

Adapun saham JAS dikuasai PT Cardig Aero Services Tbk sebesar 50,10%, sedangkan sisanya dikuasai Singapore Airport Terminal Services Limited (SATSL).

Corporate Communication Cardig Aero Services Haniffiditya menambahkan JAS sebagai anak usaha perseroan sudah mendapatkan sertifikasi IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO). (M. Tahir Saleh)